

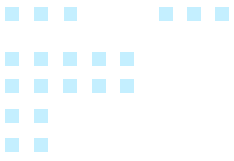


Implementasi Standard Perizinan EITI untuk Perbaikan Pengelolaan Migas Nasional

Marwan Batubara
Indonesian Resources Studies, IRESS

Semiloka Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia
Bandung, 12 November 2014






- **Pendahuluan**



• **Tren energi nasional**

- Pertumbuhan kebutuhan energi rata-rata 4%/tahun; premium 8%/tahun
 - Konsumsi energi rendah: 60 juta Btu per kapita per tahun & urutan ke-142 mengkonsumsi minyak
 - Bauran energi sangat timpang: dominasi energi fosil
 - Konsumsi BBM terus meningkat, lifting turun pengembangan EBT stagnan, kilang baru tak kunjung dibangun
 - Cadangan migas semakin menyusut: reserve replacement ratio, $RRR < 0,5$
- 

Proven Reserves (by Country) – Minyak

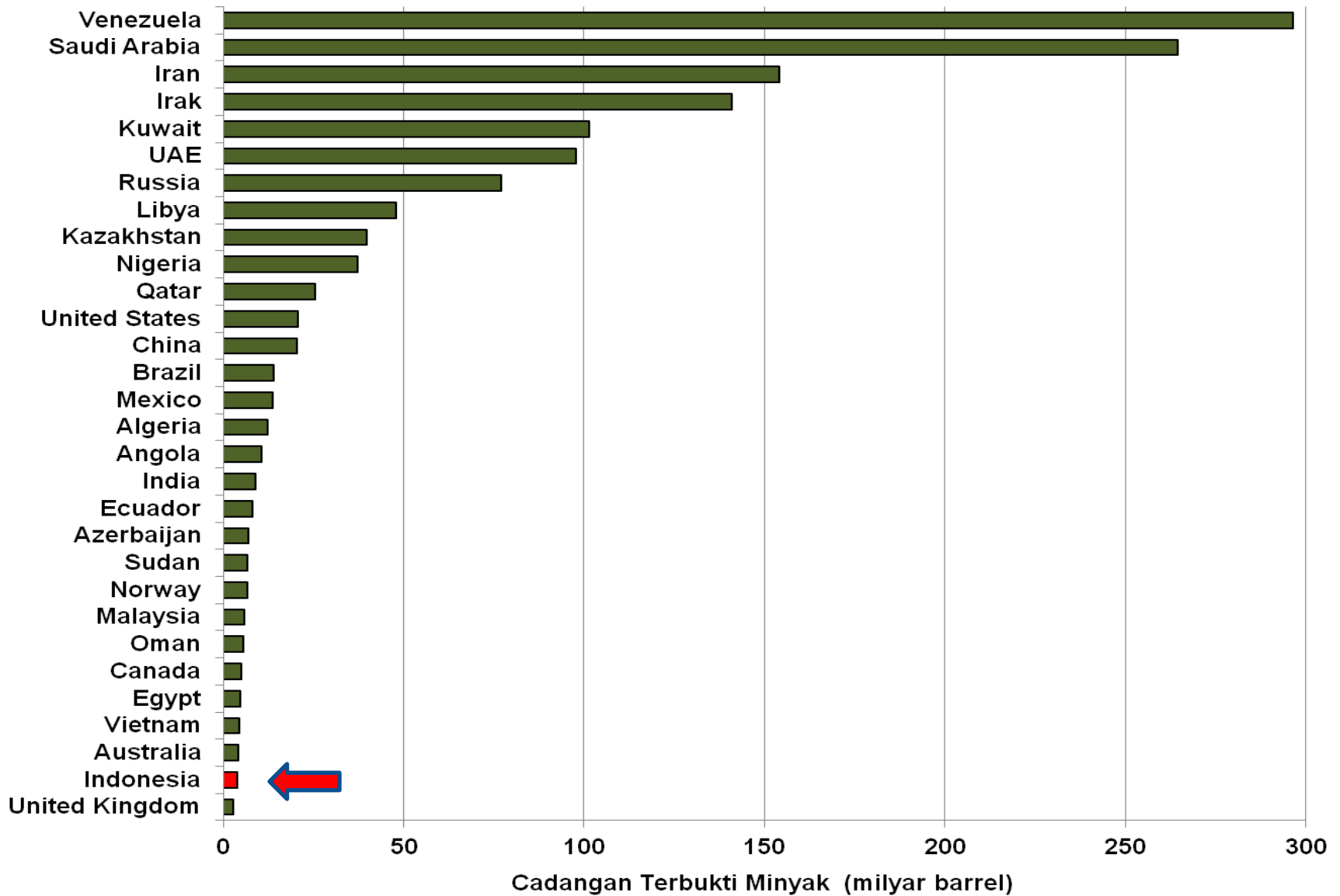
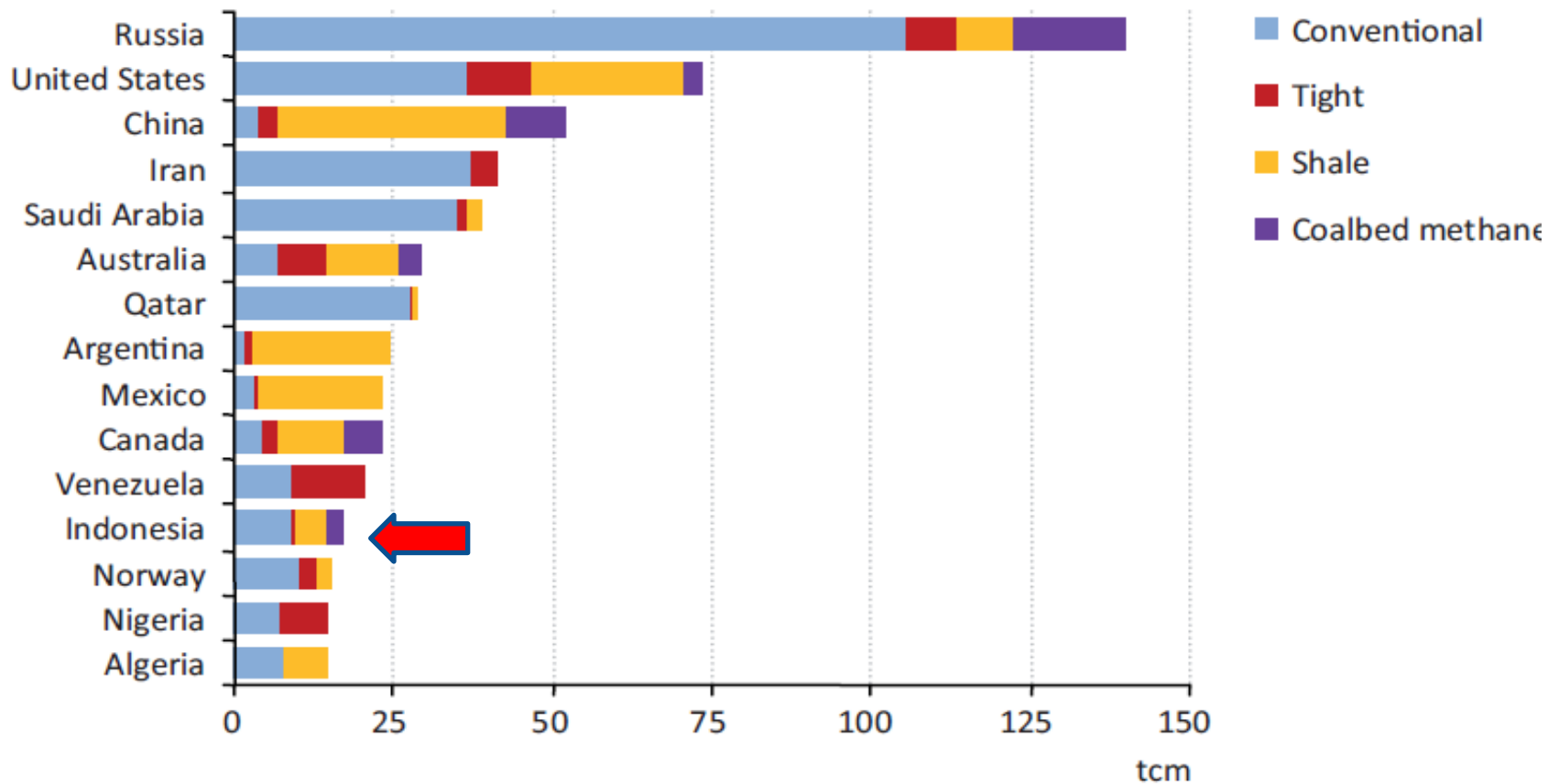


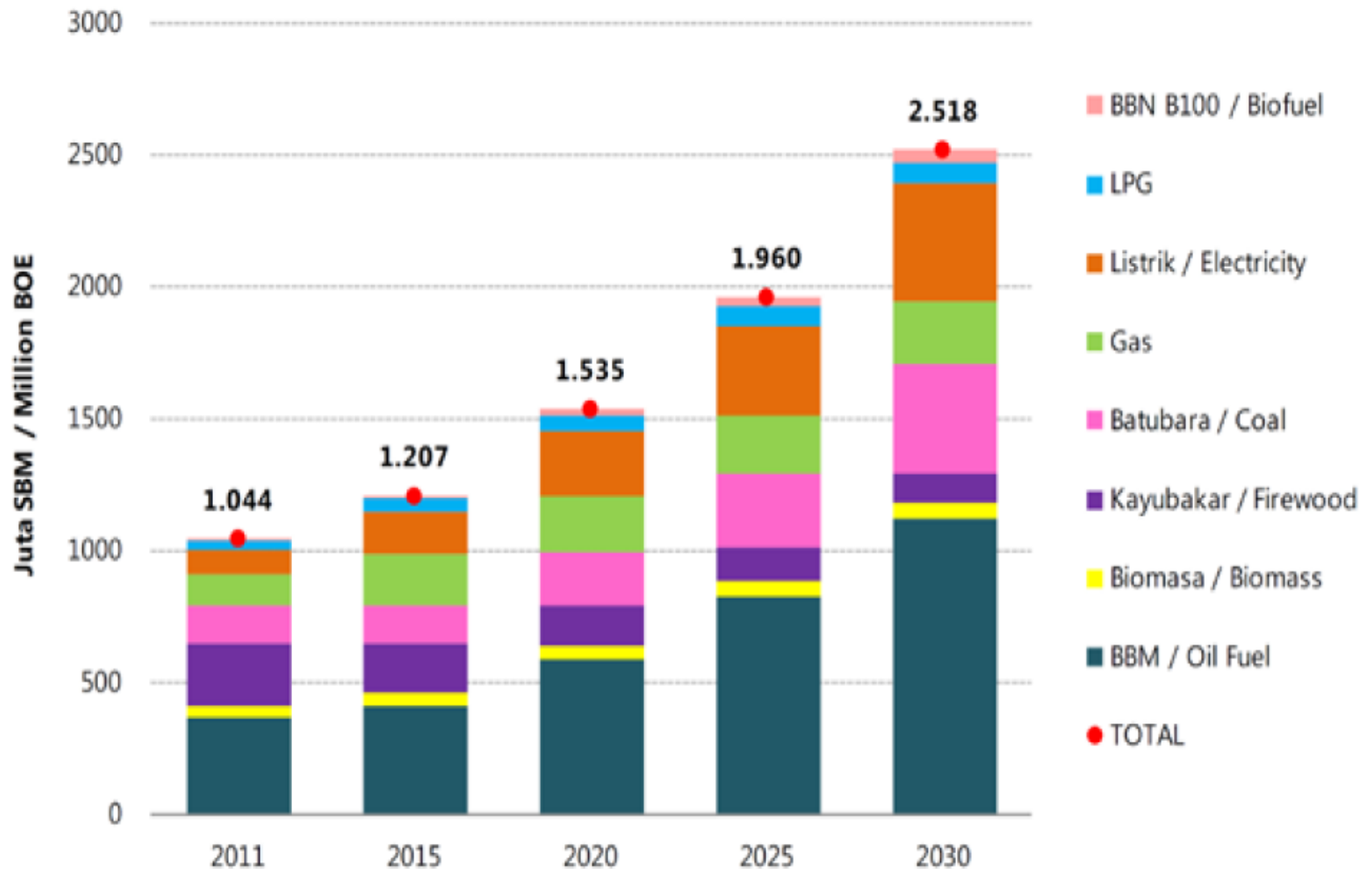
Figure 2.1 ▶ Remaining recoverable gas resources in the top fifteen countries, end-2011



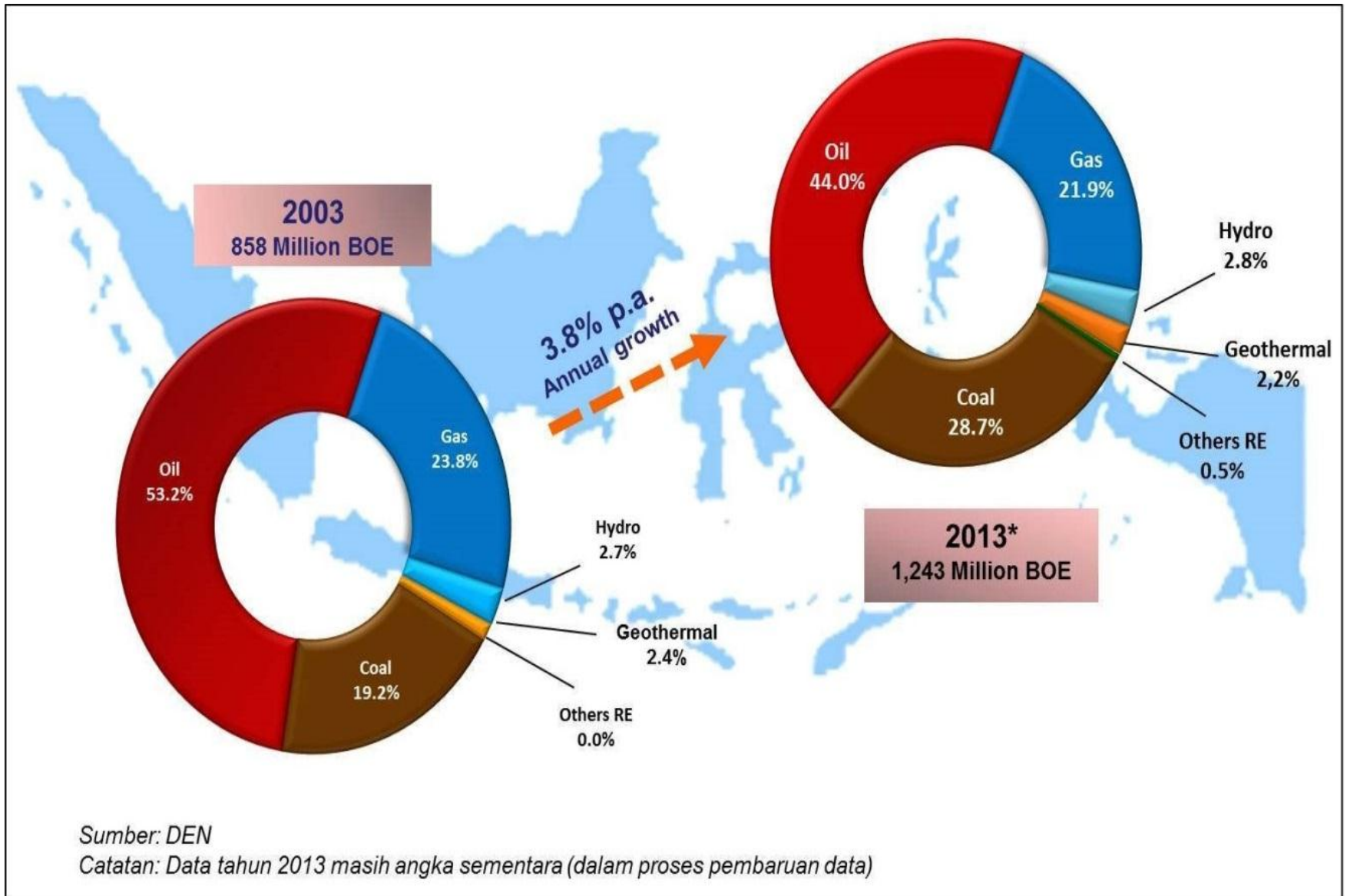
Source: IEA analysis.



Proyeksi Total Kebutuhan Energi Nasional 2030

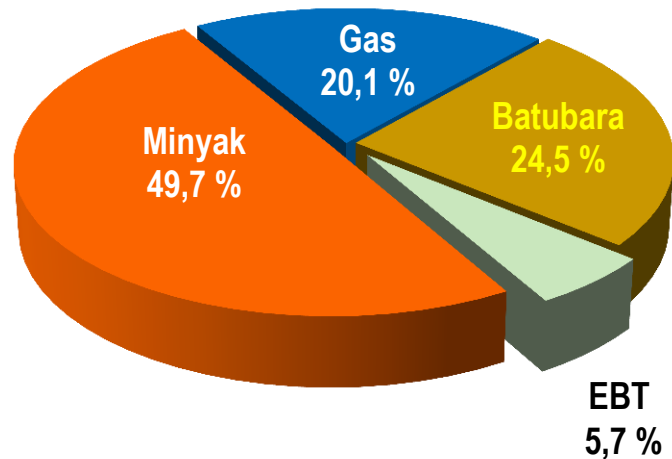


Bauran Energi Primer 2003 & 2013



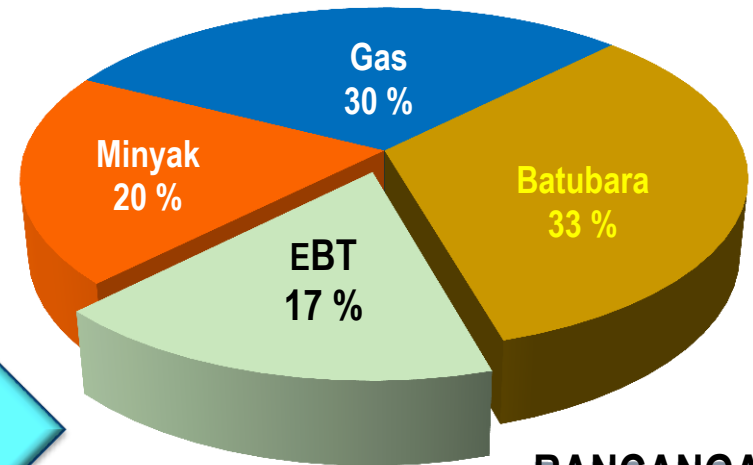
SASARAN BAURAN ENERGI NASIONAL

KONDISI 2011

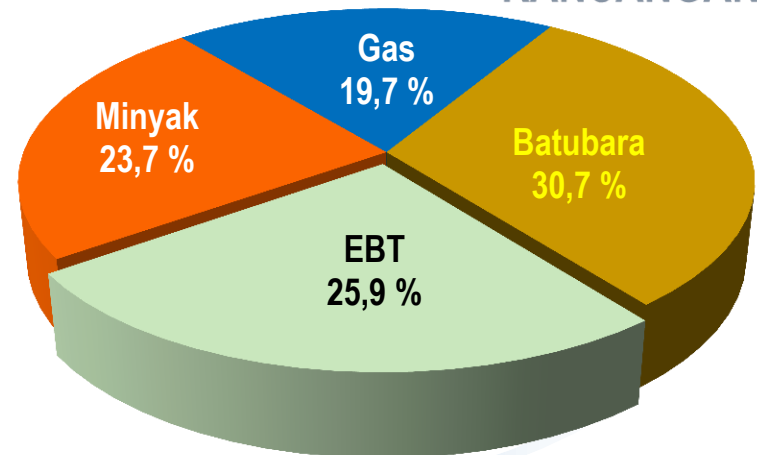


KONDISI 2025

PERPRES NO. 5/2006



RANCANGAN KEN

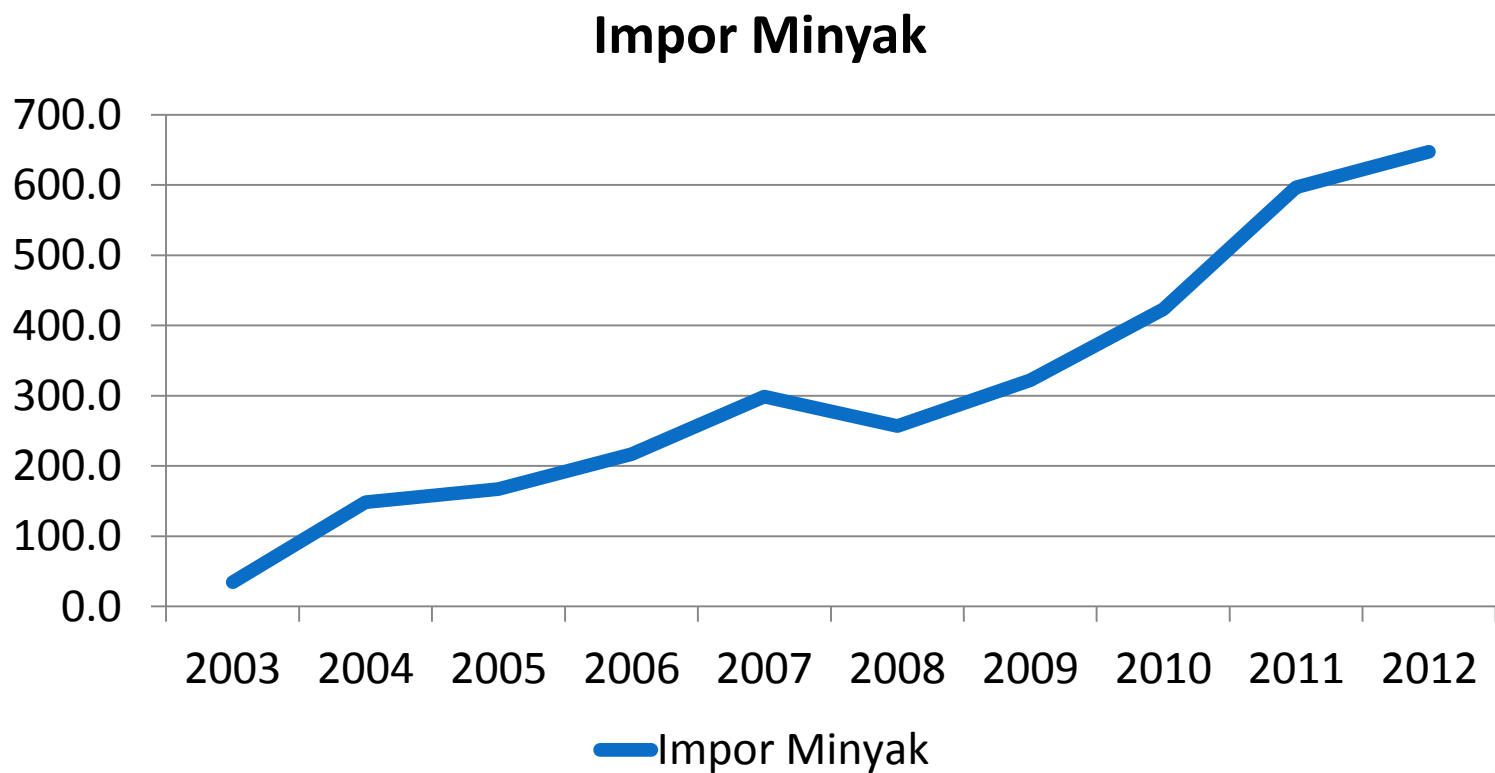


Keterangan:

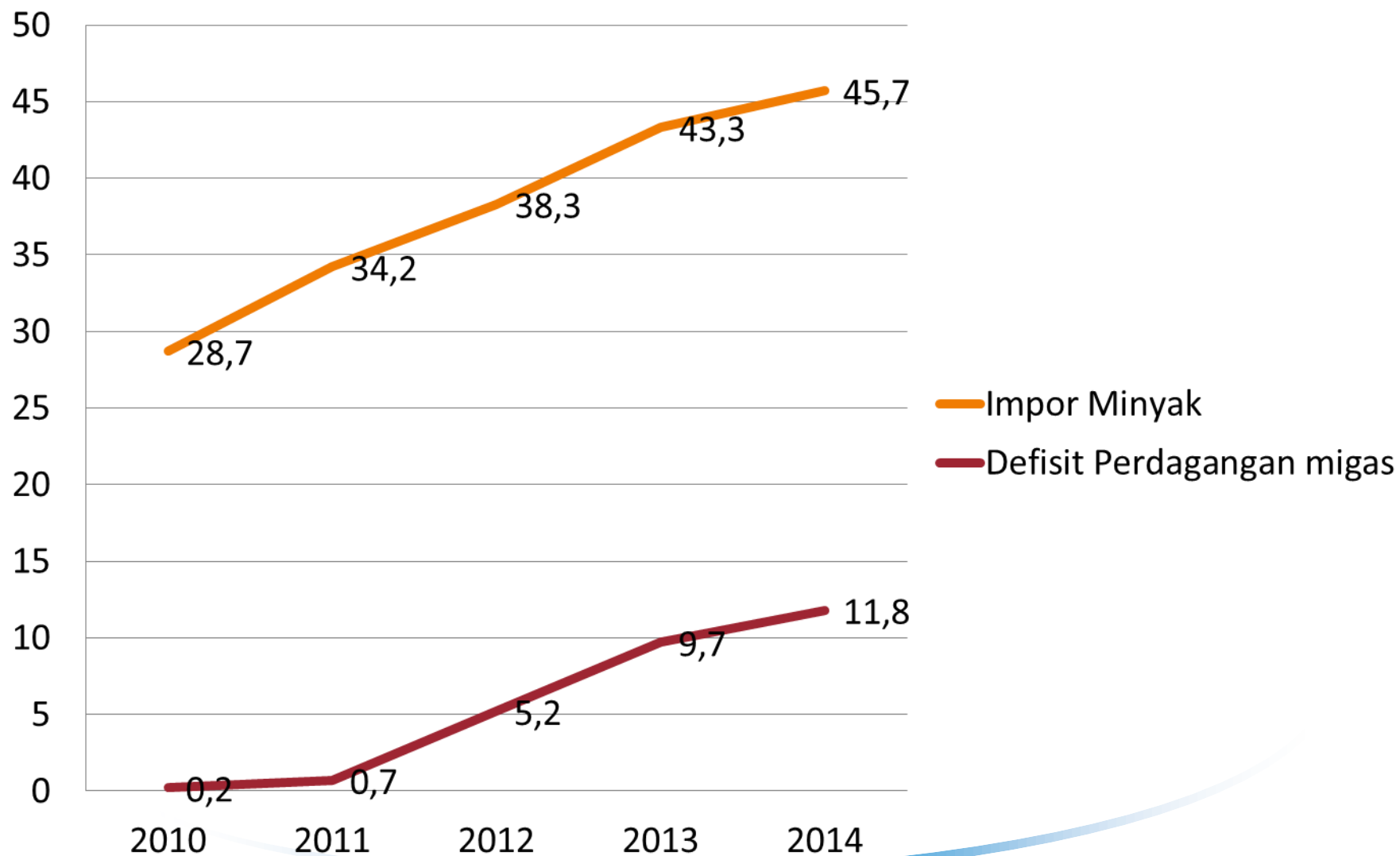
EBT = Energi Baru dan Tebarukan

KEN = Kebijakan Energi Nasional

Perkembangan Impor Minyak Nasional (juta barel)



Tren Impor Minyak dan Defisit Perdagangan Migas (Miliar USD)





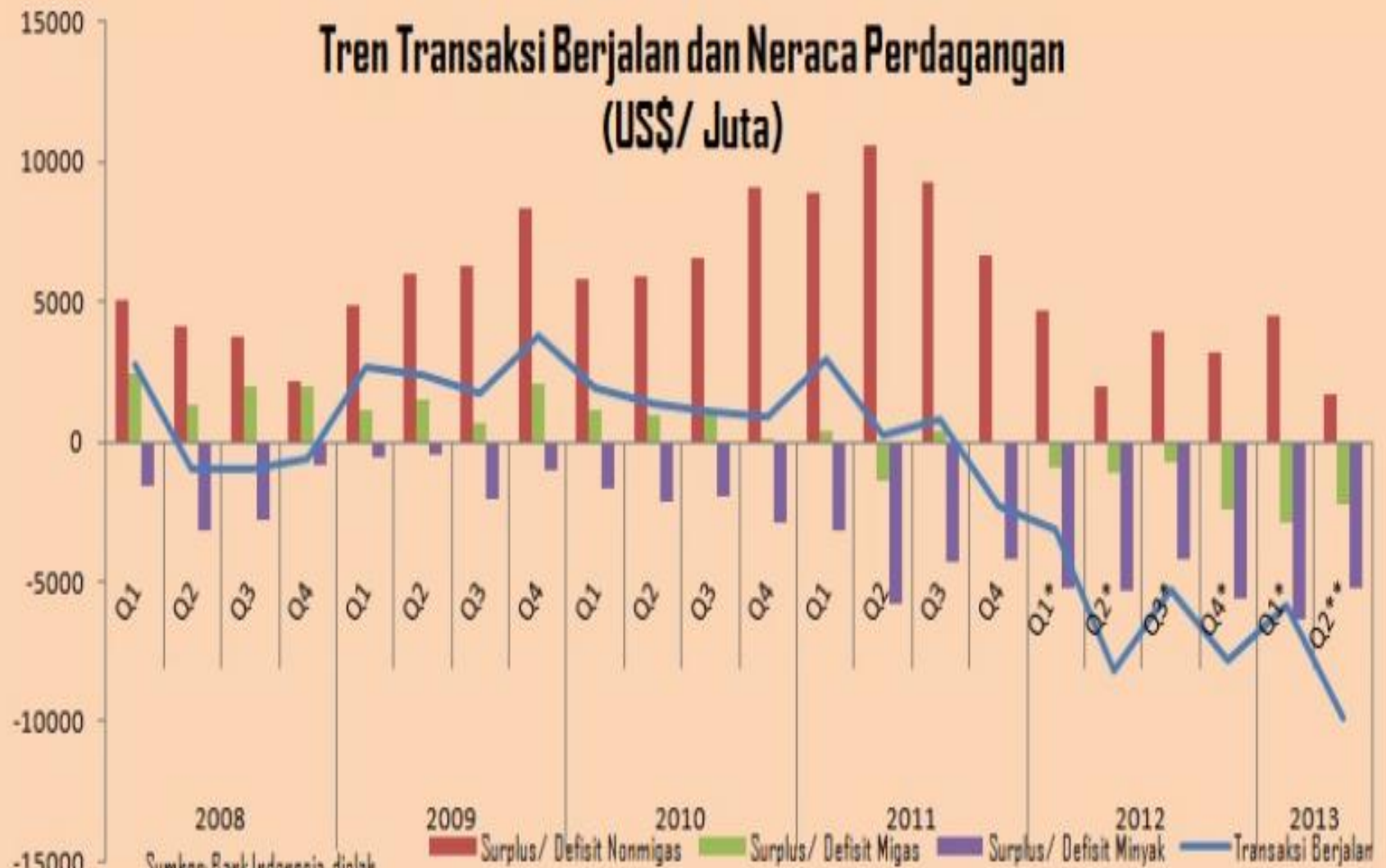
Devisa keluar untuk impor minyak

- 2011: Total US\$ 40,7 miliar
Rp 1,34 triliun per hari
- 2012: Total US\$ 42,56 miliar
Rp 1,39 triliun per hari
- 2013: Total US\$ 44,77 miliar
Rp 1,47 triliun per hari
- 2018: Total US\$ 67,40 miliar (estimasi)
Rp 2,12 triliun per hari

→ Berpotensi untuk menimbulkan krisis energi & ekonomi



Tren Transaksi Berjalan dan Neraca Perdagangan (US\$/ Juta)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

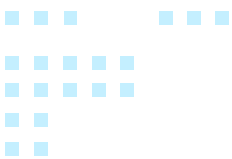
Keterangan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara



Permasalahan Mendasar


- Ketergantungan impor minyak BBM semakin tinggi
- Bauran energi bermasalah: EBT/BBN, Konversi, dll
- Ketahanan energi rapuh dan rawan
- Defisit neraca perdagangan, transaksi berjalan dan APBN meningkat dan selalu mengancam
 - Ruang fiskal kecil
 - Krisis energi & ekonomi terus mengintai akibat impor minyak yang meningkat
 - Rupiah yang terdepresiasi sangat signifikan: 28% dalam 1,5 tahun terakhir
 - Krisis produksi minyak perlu berbagai terobosan dan penanganan serius: $RRR > 1$



- **Standard Perizinan EITI**



Standard Laporan EITI

- Agar Laporan EITI komprehensif dan bermanfaat bagi publik, maka isinya harus mengandung informasi lengkap dan kontekstual yang tersedia secara terbuka pada publik
 - Informasi dimaksud termasuk uraian terkait kerangka legal, rezim fiskal, overview industri ekstraktif, kontribusi terhadap ekonomi, data produksi, partisipasi negara/BUMN, alokasi dan keberlanjutan penerimaan, lisensi/perizinan dan alokasi perizinan, beneficial ownership dan kontrak.
 - Terkait data produksi, Laporan EITI harus berisi volume dan nilai produksi per wilayah, serta volume dan nilai ekspor per wilayah
- 



Aspek Lisensi dalam Laporan EITI

- Yang dimaksud lisensi/perizinan dalam Laporan EITI termasuk: setiap lisensi, lease, title, permits atau konsesi yang diberikan oleh negara kepada perusahaan/individu untuk melakukan eksplorasi/eksploitasi sumber daya mineral & migas
- Negara perlu memublikasikan daftar setiap lisensi yang memuat informasi lengkap meliputi: pemegang lisensi, koordinat wilayah operasi, data aplikasi, perolehan dan durasi lisensi, dan jenis produksi, serta kepemilikan saham. Setiap hambatan dalam penerbitan lisensi harus terdokumentasi dgn lengkap
- Dalam hal terjadi pengalihan lisensi, maka Laporan EITI harus memuat informasi terkait deskripsi tentang proses transfer, kriteria teknis dan finansial yang digunakan, info lengkap tentang penerima lisensi, proses tender dalam pemilihan, dan setiap deviasi dari aturan yang berlaku



Aspek Kontrak dalam Laporan EITI

- Kontrak dan lisensi harus terbuka pada publik yang menyediakan terms tentang eksploitasi SDA migas
- Laporan EITI harus mendokumentasikan kebijakan pemerintah tentang kebutuhan keterbukaan informasi terkait kontrak dan lisensi yang mengatur eksploitasi SDA migas dan minerba
- Terms kontrak adalah keseluruhan isi kontrak, konsesi dan perjanjian PSC, serta perubahan atau tambahan atas perjanjian yang terjadi
- Terms lisensi adalah keseluruhan teks lisensi, leasi, title dan permit dengan apa pemerintah memberikan hak eksploitasi SDA migas dan minerba, termasuk jika ada perubahan dan tambahan.




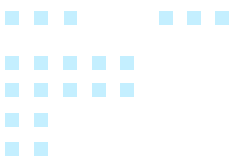
Permasalahan Perizinan --1

- Banyak kebutuhan standard Laporan EITI terkait aspek perizinan yang belum terpenuhi Pemerintah RI. Namun lebih dari itu, proses memperoleh izin tersebut justru lebih mendesak untuk diselesaikan
- Permasalahan **perizinan atau perolehan lisensi** merupakan salah satu kendala utama, yang telah diketahui dan dibicarakan bersama selama bertahun-tahun, yang menyebabkan tertunda dan gagalnya berbagai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas: Lifting migas turun & cadangan migas menipis
- Namun permasalahan perizinan berlangsung tanpa solusi, tanpa upaya serius dan komprehensif untuk diperbaiki, serta tanpa komitmen dan target yang jelas untuk diselesaikan



Permasalahan Perizinan -- 2


- Perizinan kadang-kadang dilingkupi dan sarat kepentingan politik
 - Moral hazard berperan penting pula dalam proses perizinan
 - Terdapat intervensi berbagai pihak eksternal, yang berburu rente dan kekuasaan
 - Undang-undang dan peraturan yang ada bermasalah dan sebagian ketentuannya inskonstitusional
 - Pelanggaran peraturan atau bahkan penyelewengan dimulai dari peraturan yang dibuat bermasalah
 - Lemahnya fungsi pengawasan internal & eksternal dan kuatnya keinginan untuk melakukan KKN
 - Tidak efektifnya fungsi regulator & keuangan
- 



- **Kebutuhan Perbaikan**



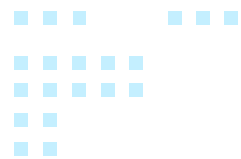
Kebutuhan untuk Perbaikan -- 1

- Perlu penyusunan dokumen standard & publikasi informasi secara transparan
 - Perlunya kepatuhan menjalankan azas good governance secara konsisten: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran, dll
 - Perlunya komitmen yang kuat untuk perbaikan dan penyelesaian masalah
 - Perlunya pengaturan dan pengurangan peran Daerah terutama terkait aturan Otonomi Daerah
 - Perlunya penetapan target yang realistis dan feasible
 - Perlu peningkatan kordinasi antar lembaga terkait, yang dipimpin minimal oleh Wapres
- 



Kebutuhan untuk Perbaikan - 2

- Perlu penetapan visi dan kebijakan ketahanan dan kemandirian energi sebagai prioritas politik negara
- Perlu segera menetapkan UU Migas baru sebagai pengganti UU No.22/2001 dan sejalan dengan 2 keputusan MK
- Tetapkan hanya sebuah BUMN sebagai pelaksana tugas konstitusional negara dalam menguasai SDA Migas. BUMN berperan sebagai pemegang hak ekonomi dan pelaku bisnis yang menjadi pilar utama ketahanan energi nasional
- Guna mencapai kebutuhan GCG/Tata kelola yang baik, perlu penetapan aturan khusus tentang BUMN migas yg sejalan dengan amanat konstitusi dan kepentingan strategis nasional: non-listed public company (NLPC) Pertamina Baru (Berdasar UU No.8/1971)



Terima Kasih